

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DESA
KUSU LOVRA KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

RIZKY PAUL UTOMO NGANGANGOR

J. H. Posumah

T. Sondakh

***ABSTRACT :** This study questioned the fundamental problems, namely: the extent of the influence of policy implementation Budget Village (APBDes) the success of development in the village of Lovra Kusu District of North Halmahera Kao? Thus, this research aims: to determine the extent of the effect of policy implementation Budget Village (APBDes), the success of Rural Development in Kusu Lovra Kao District of North Halmahera.*

This empirically using a quantitative approach to the application of descriptive and explanatory methods. The data and information collected through questionnaires distributed technique to 50 respondents, and is equipped with observation and documentation, then analyzed by applying techniques product moment correlation analysis and simple linear regression.

Based on the results of data analysis, it is known that the success of the implementation APBDes and Rural Development in the Rural District of Kao Kusu Lovra North Halmahera in the category "medium" or quite successful. This fact indicates that the optimal policy implementation APBDes yet so can impact on non-optimal achievement of success of rural development in the village. This is due to inadequate availability of resources, particularly the amount and quality of human resources involved in the policy itself APBDes.

Thus, it can be concluded that the implementation of policy APBDes positive and significant impact on the success of rural development, particularly in rural Kusu Lovra Kao subdistrict of North Halmahera. To optimize the execution / implementation of policies APBDes, North Halmahera district government needs to increase the number and quality of village officials in charge of human resources managing rural finance through professional technical training.

Keywords : Implementation of policy, Budget Village, Rural Development.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “ Pemerintahan Daerah ” dan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1999 tentang “ Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ”. Pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut lebih ditekankan pada azas desentralisasi terutama untuk daerah kabupaten/kota.

Azas desentralisasi yang dimaksud yaitu daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai aspirasi masyarakat di daerah tersebut (sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat). Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya termasuk didalamnya kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Undang-Undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, tetapi pada dasarnya tidak ada perubahan yang terlalu mencolok dalam undang-undang tersebut terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Desa Kusu Lovra adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Kao kabupaten Halmahera Utara. Desa Kusu Lovra merupakan desa yang jauh dari ibu kota kabupaten. Desa Kusu Lovra pun yang setiap tahunnya diberikan bantuan dana yang begitu besar oleh perusahaan dan pemerintah daerah, dengan demikian keuangan desa makin bertambah karena ditambah dengan pendapatan asli desa. Anggaran/keuangan desa ini disusun dalam APBDes setiap tahun oleh pemerintah.

Dengan melihat keuangan desa yang sangat besar, seharusnya pembangunan di desa Kusu Lovra sangat maju dibandingkan dengan daerah yang lainnya, tapi kenyataannya belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga pembangunan di desa Kusu Lovra belum berjalan optimal.

Meskipun dana yang dimiliki oleh suatu daerah sangat besar, tetapi bila tidak dikelola dengan baik dalam penggunaannya (dalam proses implementasinya) maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada daerah tersebut, karena dalam proses implementasi selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) dengan apa yang senyatanya dicapai (hasil dari penerapan kebijakan), atau dengan kata lain kebijakan tersebut memiliki peluang gagal dalam pelaksanaannya.

Hogwood dan Gun (dalam Abdulwahab, 2004:61), membagi pengertian kegagalan kebijakan ke dalam dua kategori, yaitu *non implementation* dan *unsuccessful implementation*. Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak

dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakalah suatu tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan lain sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Suatu pembangunan menuntut suatu perubahan yang dinamis dari keadaan yang ada menuju suatu keadaan yang lebih baik. Dengan kata lain pembangunan bukan hanya menuntut pertumbuhan secara kuantitatif tetapi pada hakekatnya menuntut perubahan yang mendasar kualitatif pada setiap kehidupan masyarakat yaitu merubah masa yang lampau yang buruk menjadi lebih baik untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Untuk meraih keberhasilan pembangunan desa yang optimal,

diperlukan dukungan sumber daya yang memadai, terutama pendapatan atau penerimaan desa yang cukup. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pemerintah desa Kusu Lovra mengelola beberapa sumber pendapatan, antara lain : a). pendapatan asli desa (PADes), yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b). alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c). bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d). alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e). bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f). hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g). lain-lain pendapatan Desa yang sah (Anonymous, 2014).

Untuk itu, Pengaruh Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat diharapkan guna mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri, begitu juga dengan pembangunan di desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.

Pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah desa memainkan perannya dapat secara langsung dan melibatkan diri dalam pembangunan desa agar desa Kusu yang tadinya relatif tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lain dapat secara bertahap menuju kearah yang lebih baik. Disamping itu partisipasi dari seluruh masyarakat akan menjadi kontribusi yang sangat besar dalam menunjang program pemerintah desa. Keterlibatan dari seluruh masyarakat dalam pembangunan desa Kusu akan sangat menjamin tercapainya tujuan berhasilnya pembangunan tersebut.

Dalam kaitannya dengan latar belakang penulisan ini, maka penulis mengangkat judul dalam penelitian ini dengan menitik beratkan pada “Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa”(Suatu studi di Desa Kusu Lovra Kec.Kao Kabupaten Halmahera Utara).

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian Ini dapat didesain sebagai suatu penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Umar (1998) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang didasarkan atas data angka-angka dan

perhitungannya ditujukan untuk penafsiran kuantitatif (Umar, 2007).

B. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu “Implementasi Kebijakan APBDes” (variabel bebas), dan “Keberhasilan Pembangunan Desa” (variabel terikat). Variabel-variabel penelitian tersebut dibuat definisi operasional masing-masing sebagai berikut :

1. Variabel Implementasi Kebijakan APBDes (X), indikatornya adalah : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, Profesional.
2. Variabel Keberhasilan Pembangunan Desa (Y) didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kondisi prestasi yang dicapai secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dalam wujud peningkatan kondisi dan taraf hidup; peningkatan partisipasi dan peningkatan kemandirian masyarakat berupa realisasi program-program atau proyek-proyek pembangunan desa yang ditetapkan baik yang berasal dari program/proyek

pemerintah maupun program yang ditetapkan di tingkat desa. Indikator pengukurannya sebagai berikut : Peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan kemampuan berkembang secara mandiri, Tingkat tercapainya tujuan, sasaran, ataupun target-target dari program/proyek yang dilaksanakan.

C. Populasi dan Sampel

Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pemerintah desa serta BPD yang ada di desa Kusu Lovra sebanyak 50 Kepala Keluarga.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner atau daftar pertanyaan; , Studi Dokumentasi, Observasi.

E. Teknik Analisa Data

1. Untuk mendeskripsikan variabel penelitian, digunakan teknik analisis persentase yang diolah dalam tabel distribusi frekuensi, dengan menerapkan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f_i}{n} (100 \%)$$

2. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pola hubungan pengaruh dari variabel bebas “Implementasi kebijakan APBDes” (X) terhadap variabel terikat “Keberhasilan Pembangunan desa” (Y). Pola hubungan pengaruh dinyatakan dengan persamaan regresi linear sederhana, sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana :

\hat{Y} = Nilai Y prediksi
(Keberhasilan Pembangunan Desa)

- a = Nilai Y pada posisi konstan (tetap), ketika nilai X= 0, diperoleh melalui rumus :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{(n\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

3. Untuk mengetahui koefisien korelasi variabel X terhadap Y digunakan rumus *Product Moment* (Sugiyono, 2005) :
4. Untuk mengetahui derajat determinasi (daya penentu) atau besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas, diperoleh dengan cara mengkwadratkan harga/nilai koefisien korelasi, yaitu (r^2).

Untuk uji signifikansi hubungan antara variabel, maka nilai r-hitung langsung dikonsultasikan dengan nilai r-tabel pada taraf uji 1 % dengan $dk = n$.

Penerapan semua teknik analisis dibantu dengan program SPSS for windows versi 20, melalui perangkat computer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka terlebih dahulu akan penulis gambarkan atau deskripsikan keadaan variabel-variabel penelitian, sebagai berikut:

1. Variabel Implementasi Kebijakan APBDes

Mengacu pada hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden yang diwawancarai, ternyata ada sekitar 20 responden atau sebesar 40,0 % yang menyatakan bahwa Implementasi kebijakan APBDes berada pada kategori sedang; 19 responden atau sekitar 38,0 % berada pada kategori tinggi dan sisanya sebanyak 11 responden atau sekitar 22,0 % yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan berada pada kategori rendah.

Hasil ini sejalan dengan hasil analisis rata-rata (hitung), di mana rata-

rata Implementasi kebijakan APBDes diperoleh sebesar $X = 19,82$ atau dalam skala ideal pengukuran berdasarkan kriterium (skor maksimum = 30) diperoleh sebesar 0,661 atau 66,1 %. Ini berarti bahwa secara nyata, rata-rata pelaksanaan Implementasi kebijakan APBDes berada pada kategori sedang atau cukup memadai.

B. Pembahasan

Dari hasil analisis regresi linear sederhana dengan persamaan $\hat{Y} = 8,613 + 1,073X$, dan korelasi *product moment* dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,935 dapat teruji hipotesis, yang menyatakan “ Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpengaruh positif terhadap keberhasilan pembangunan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara ”, pada taraf signifikansi 1%. Sementara itu, kontribusi Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (X) terhadap keberhasilan pembangunan desa (Y) diperoleh sebesar 87,3%. Hal ini bermakna bahwa, variasi perubahan Keberhasilan pembangunan desa turut dipengaruhi oleh variasi perubahan pada Implementasi kebijakan APBDes sebesar $\pm 87,3\%$, dan sisanya sebesar $\pm 12,7\%$ turut ditentukan oleh faktor-faktor lain.

Dengan terujinya hipotesis penelitian, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka persamaan regresi di atas dapat dilakukan prediksi. Artinya bahwa naik turunnya Keberhasilan pembangunan desa karena pengaruh Implementasi Kebijakan APBDes dapat diprediksikan melalui persamaan regresi tersebut. Berdasarkan instrumen yang dikembangkan, skor Implementasi Kebijakan APBDes yang tertinggi atau skor ideal adalah 50, oleh karena itu bila Implementasi Kebijakan APBDes dinaikkan menjadi 50 skor, maka Keberhasilan pembangunan desa, khususnya di desa Kusu Lovra akan meningkat sebesar $\hat{Y} = 8,613 + 1,073(30) = 40.803$. Ternyata jika Implementasi kebijakan APBDes ditingkatkan hingga maksimal (30 skor) atau 100 %, maka Keberhasilan pembangunan desa akan naik dari rata-rata empirik sebesar 29,9 menjadi 40,80 atau naik sebesar 10,9 (21,8%) dari skor idealnya. Perlu diketahui bahwa walaupun Implementasi kebijakan APBDes telah didorong hingga mencapai skor maksimal (30 skor), namun Keberhasilan pembangunan desa tidak dapat mencapai skor maksimal = 50. Hal ini berarti bahwa terdapat pula faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan (naik atau turunnya)

keberhasilan pembangunan desa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila implementasi/pelaksanaan APBDes di desa Kusu Lovra dipacu sampai 100%, maka Keberhasilan pembangunan desa akan mengalami perubahan atau peningkatan hingga mencapai 81,6 %.

Realitas hasil penelitian ini secara teoritis dapat dibenarkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan satu-satunya instrument keuangan desa yang dapat membiayai aktivitas pemerintahan, terutama pembangunan desa, khususnya di desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.

Tanpa adanya anggaran pendapatan desa yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan desa, walaupun perencanaan pembangunan desa telah tersusun dengan baik, maka pemerintah dan masyarakat desa tidak dapat berbuat banyak untuk membangun desanya. Hal ini ditunjukkan dari harga konstanta "a" hanya sebesar 6.613 atau keberhasilan pembangunan desa hanya dapat dicapai sebesar 13,22 % saja apabila tanpa adanya anggaran desa yang memadai.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini berimplikasi perlu dilakukan upaya-upaya konkrit untuk meningkatkan Penerimaan/pendapatan Desa yang bersumber dari : a). pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b). alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c). bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d). alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e). bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f). hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g). lain-lain pendapatan Desa yang sah (Anonimous, 2014).

Dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan/pendapatan desa, maka diharapkan proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dapat dibiayai sehingga mencapai hasil yang optimal pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian tentang

Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Keberhasilan Pembangunan Desa di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi APBDes dan Keberhasilan Pembangunan Desa di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara berada pada kategori “sedang” atau cukup berhasil. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan APBDes belum optimal sehingga dapat berdampak pada belum optimalnya pencapaian keberhasilan pembangunan desa di desa tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum memadainya ketersediaan sumber daya, terutama jumlah dan mutu sumber daya manusia pelaksana kebijakan APBDes itu sendiri.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa, khususnya di desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya telah teruji

keberlakuannya secara empiris sekaligus memberikan pembenaran terhadap teori-teori yang mendasarinya.

B. Saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran, antara lain :

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan/implementasi kebijakan APBDes, maka pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu meningkatkan jumlah dan mutu SDM aparat desa yang bertugas mengelola keuangan desa melalui pelatihan teknik professional.
2. Mengingat signifikannya pengaruh implementasi kebijakan APBDes terhadap keberhasilan pembangunan desa, maka sumber-sumber pendapatan desa berdasarkan peraturan desa perlu dikelola secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulwahab, Solichin, 2008, *Analisi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Afifuddin, , 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung .

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Anonimous, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakrta.

Arikunto. 2000. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.

Betten, T.R., 1979, *Pembangunan Masyarakat Desa*, terjemahan Surjadi, Alumni, Bandung.

Bintaro. 1983. *Pembangunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta.

Chandler. R. C. & J. C. Plano. 1988. *The Public Administration Dictionary. Second Edition*: Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.

Danim. S. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Dunn. W.N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Inc.

Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs Prentice Hall Inc.

Goni, Jourdan, 1984, Hubungan Antara Peranan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Di Minahasa, *Thesis S2*, UGM, Yogyakarta.

Islamy. I. 2009. *Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta.

Kartasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan)* Jakarta : PT. Pustaka SIDESINDO.

Moeljarto, Vidhyandika dan Sonia, Prabowo, 1997. Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Sosial, dalam Majalah CSIS Tahun XXVI No.1 Januari-Februari 1997.

Ndraha Taliziduhu, 1988, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Bina Aksara. Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung

Safi'I, 2009, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Averroespress. Malang.

Sayogyo, Pudjiwati. 1980. *Sosiologi Pedesaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Sukasmanto dkk. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Sutardjo, Kartohadikusumo. 1953. *Proses Pembangunan Desa*. LSIS. Jakarta.

Syafie, Kencana Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1984, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, Mustopadidjaja, 1984, *Pengantar Tentang Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1987, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, yogyakarta.

Umar. H., 2007, *Metodologi Penelitian*. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.

Widjaja. HAW. 2010. *Otonomi Desa*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Sumber-sumber lain :

- PP No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang desa